

Mindset Kurikulum Merdeka

Syarifuddin Idris^{1*}

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur tentang *mindset* Kurikulum Merdeka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian deskriptif dalam hal ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kebijakan merdeka belajar sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan sumber yang diambil yaitu dari dokumen naskah akademik merdeka belajar, pedoman-panduan merdeka belajar, peraturan Menteri tentang pengembangan kurikulum, buku saku *platform* Merdeka Belajar dan kajian buk-buku ilmiah yang sudah diterbitkan dengan maksud untuk dijadikan sebagai bahan referensi. Hasil dari penelitian menunjukkan, terjait dengan kebijakan Merdeka Belajar bertujuan untuk meningkatkan performa mutu Pendidikan melalui proses pembelajaran, kreativitas dan komitmen guru. Hasil ini berkontribusi dalam memberikan informasi yang komprehensif terkait Kurikulum Merdeka di Indonesia, sehingga nantinya dapat menjadi rekomendasi dan ide dalam implementasi Kurikulum Merdeka selanjutnya.

Kata kunci: kurikulum merdeka, *platform* merdeka belajar

History:

Received : 07 Nov 2023

Revised : 12 Nov 2023

Accepted : 27 Nov 2023

Published : 11 Dec 2023

¹IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

*Author Correspondent: syariefidriso@gmail.com

Publishers: LPM IAIN Shaykh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

Licensed: This work is licensed under aCreative Commons Attribution 4.0 International License.



Pendahuluan

Kurikulum merupakan aspek yang paling fundamental dalam pembangunan dunia pendidikan. Kurikulum merupakan “*chip*” yang berisi beragam keinginan dan harapan dari suatu komunitas masyarakat tertentu untuk memperbaiki dirinya, saat ini dan di masa akan datang. Kurikulum dalam sistem pendidikan dijadikan pusat dari semua sistem penggerak komponen Pendidikan (Ahmad Yani, 2013). Kurikulum sebagai tumpuan harapan kualitas pendidikan masa depan maka kurikulum perlu didesain dan dikembangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional dan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia (Puskur, 2020). Pengembangan kurikulum di Indonesia sangat penting untuk membangun sumber daya manusia, tidak ada kata lain yang harus diwujudkan yakni memberikan pendidikan kepada generasi bangsa secara berkelanjutan (Hamzah B. Uno dkk, 2019). Kurikulum sebagai dimensi peningkatan kualitas pendidikan selalu mengalami perubahan ataupun pengembangan disebabkan tuntutan untuk beradaptasi dengan kondisi jaman.

Jika ditelusuri dari rekam jejak sejarah terkait perubahan atau pengembangan kurikulum, sekira 12 kali kurikulum mengalami perubahan. Perubahan terakhir dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka Belajar. Di Indonesia pengimplementasian kurikulum telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan yaitu tahun 1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997 (revisi kurikulum 1994), tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan system politik, ekonomi, sosial budaya dan iptek dalam masyarakat berbangsa (Hamzah B. Uno dkk, 2019). ada tahun 2013 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional melakukan pengembangan kembali menjadi Kurikulum 2013 (Kurtilas) dan pada tahun 2018 terjadi revisi menjadi Kurikulum 2013 revisi (Restu Rahayu dkk, 2022). Perubahan kurikulum tidak bisa dihindari, karena kurikulum memainkan peran penting dalam sejarah hubungan antara sekolah dan komunitas serta menjadi subjek untuk menganalisis yang dimiliki dan dihadapi sekolah dengan institusi atau lingkungan lainnya (Michael W. Apple,

2021). Oleh karena itu, desain Kurikulum Merdeka tetap mengacu pada evaluasi kurikulum sebelumnya sebagai dasar mengkonstruksi kebijakan pendidikan masa yang akan datang.

Sejumlah peneliti telah mendokumentasikan hasil penelitiannya terkait Kurikulum Merdeka (Alamia Haque Insani & Kukuh Munandar, 2023; Fitra Ramadani dkk, 2023; Nanda Ribatul Hilda dkk, 2022; Marnis Susanti dkk, 2023; Lenny Sapitri, 2022; Intan Pertiwi dkk, 2023; Hafsa Dzata Rahmah dkk, 2022; Anita Jojor & Hotmaulina Sihotang, 2022; dan Anisa Tri Damayanti dkk, 2023). Penerapan pembelajaran berdiferensiasi termasuk implementasi pembelajaran paradigma baru pada Kurikulum Merdeka dengan membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik (Alamia Haque Insani & Kukuh Munandar, 2023). Tantangan dalam perubahan mindset pendidik dan peserta didik serta terbatasnya infrastruktur adalah tantangan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Tantangan dalam perubahan mindset pendidik dan peserta didik serta terbatasnya infrastruktur adalah tantangan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Solusi untuk Mengatasi tantangan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dapat berupa pelatihan dan pembinaan, akses internet, fasilitas pendukung, dukungan pemerintah, dan keterlibatan stakeholder (Fitra Ramadani dkk, 2023). Kurikulum Merdeka Belajar dapat: membuat siswa dan guru menjadi lebih kreatif, inovatif, dan tentunya lebih maju dalam penggunaan teknologi; adanya kebebasan siswa dalam memperoleh informasi dalam belajar sehingga meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan berpikir logis serta meningkatkan kognitif siswa. Akibatnya pembelajaran matematika menjadi lebih maju dikarenakan pengimplementasian merdeka belajar (Nanda Ribatul Hilda, 2022). Perbedaan penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum mandiri pada setiap jenjang adalah sebagai berikut: untuk jenjang pendidikan Paud 5-6. Dalam evaluasi kurikulum 2013 dicatat evaluasi proses perkembangan anak dan hasil belajar untuk evaluasi mingguan atau bulanan dicatat dan ditarik kesimpulan sebagai dasar perkembangan anak dalam pelaporan kepada orang tua. Sebaliknya, dalam kurikulum mandiri atau merdeka, ada laporan tertulis kepada orang tua minimal 6 bulan sekali, yang memuat gambaran pembelajaran anak, dan laporan atau komunikasi verbal dengan orang tua dapat dilakukan kapan saja (Marnis Susanti dkk, 2023).

Satuan pendidikan di Indonesia diberikan kebebasan menentukan tiga kurikulum yang ada yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat (kurikulum 2013 yang disederhanakan) dan kurikulum merdeka belajar. Pemberian kebebasan tersebut diberikan agar satuan pendidikan leluasa dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kondisi di sekolahnya serta memberikan waktu kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terkait kurikulum Merdeka (Lenny Sapitri, 2022). Tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman dan keterlibatan semua stakeholder dalam konsep kurikulum merdeka, serta kebijakan yang belum mendukung secara menyeluruh menjadi hambatan tersendiri dalam setiap pelaksanaan kegiatan mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar di sekolah-sekolah penggerak (Intan Pertiwi, 2023). "Kurikulum Merdeka" di tingkat satuan pendidikan dapat mengurangi Learning Loss selama pandemi COVID-19 (Anita Jojor, 2022).

Namun, sejumlah penelitian sebelumnya masih berfokus kepada suatu perlakuan, informasi dan urgensinya. Sehingga penelitian ini berfokus kepada kajian pustaka yang berkaitan Kurikulum Merdeka yang diadaptasi dari naskah akademik dan pedoman Kurikulum Merdeka Belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah penelitian literatur serta implementasi Kurikulum Merdeka setiap jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan gambaran umum mengenai pengembangan Kurikulum Merdeka yang ditinjau dari prinsip pengembangan, kerangka Kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran Kurikulum Merdeka, struktur Kurikulum Merdeka, prinsip pembelajaran Kurikulum Merdeka, dan perangkat ajar. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ini adalah metode *Library Research* (studi kepustakaan). Penelitian yang menggunakan *Library Research* informasi data diperoleh dari beragam sumber seperti buku, artikel

jurnal yang bertemali dengan masalah yang akan dibahas. Peneliti mengumpulkan data pustaka, informasi yang pernah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, catatan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang bertemali dengan pengembangan Kurikulum Merdeka. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode akses situs yang menyediakan berbagai informasi yang bertemali dengan Kurikulum Merdeka.

Hasil dan Diskusi

Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan Pendidikan dalam kondisi khusus. Krisis pembelajaran yang terjadi di Indonesia yang diperparah oleh pandemic Covid-19 menjadi tantangan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan implementasi kurikulum darurat dalam mengantisipasi *learning lost* peserta didik, intervensi kurikulum menjadi salah satu aspek penting dalam upaya tersebut. Implementasi kurikulum prototipe pada satuan pendidikan secara umum menunjukkan hasil yang positif (Kemendikbud, 2021). Adaptasi kurikulum prototipe telah mendorong satuan pendidikan Menyusun perencanaan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif, serta melaksanakan proses pembelajaran yang lebih beragam dan terdiferensiasi berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

Penanganan krisis pembelajaran di Indonesia membutuhkan upaya penanganan yang holistik dan terintegrasi. Salah satu upaya khususnya terkait dalam penanganan beban kurikulum yang terlalu padat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengembangkan kurikulum prototipe. Pengembangan kurikulum ini lebih spesifik pada penyederhanaan kurikulum yang mengarahkan peserta didik untuk focus pada kompetensi esensial. Ciri khas struktur kurikulum ini adalah focus pada konteks kelokalan, fleksibilitas, dan pembelajaran yang bermakna melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), (Puskur, 2021). Dalam pembelajaran proyek ini melibatkan peserta didik berperan secara aktif dalam merespon tantangan zaman melalui aksi-aksi nyata.

Karakteristik pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan, seperti pada jenjang PAUD, struktur kurikulum lebih menekankan pada proses bermain dan belajar berbasis literasi, guru PAUD menstimulasi kegemaran anak untuk membaca melalui beragam kegiatan menyenangkan. Pada jenjang SD, menekankan pada dasar-dasar literasi, penguatan literasi mengintegrasikan pembelajaran bermain dengan beragam mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS). Pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib atau penguatan kemampuan berpikir komputasional. Sementara pada jenjang SMA, mekanisme sistem peminatan berdasarkan rumpun IPA, IPS, atau Bahasa diubah menjadi peminatan berdasarkan mata pelajaran.

Prinsip Perancangan/Desain Kurikulum Merdeka

Desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik pada seluruh rangkaian dalam perkembangan pendidikan, desain tersebut menggambarkan unsur-unsur dari kurikulum, relasi antara satu unsur dengan lainnya, prinsip-prinsip pengorganisasian, demikian halnya ragam yang dibutuhkan dalam implementasinya (Nana Syaodih Sukmana, 2013). Desain kurikulum adalah rancangan, pola atau model yang dipilih oleh sebuah sekolah atau negara dalam sistem pendidikan yang dibangunnya. Desain kurikulum harus memiliki dasar pemikiran yang rasional dan diperhitungkan secara matang agar tidak bernasib sama dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya (Ahmad Yani, 2013). Prinsip perancangan (*design principles*) Kurikulum Merdeka meliputi dua hal yaitu rancangan atau desain kurikulum yang akan dipilih dan proses kerja atau metode perancangan dikembangkan berdasarkan visi pendidikan Indonesia, teori dan hasil penelitian terkait perancangan kurikulum, serta berbagai praktek baik (*best practices*) yang diperoleh dari kajian literatur dan diskusi bersama pakar.

Prinsip-prinsip yang dijadikan rujukan dalam perancangan Kurikulum Merdeka, antara lain: (1) perancangan kurikulum atau standar capaian dalam setiap disiplin ilmu memperhatikan aspek fokus, keajegan, dan koherensi; (2) rancangan kurikulum berlaku untuk seluruh disiplin ilmu, prinsip kemampuan untuk transfer kompetensi, interdisipliner dan pilihan; (3) rancangan kebijakan kurikulum pada level makro memegang prinsip otentisitas, fleksibilitas, dan keselarasan; dan (4) proses kerja perancangan kurikulum menganut prinsip pelibatan (*engagement*), keberdayaan atau kemerdekaan peserta didik serta keberdayaan atau kemerdekaan guru (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen, 2021). Empat prinsip tersebut merupakan salah satu yang dijadikan rujukan dalam menetapkan desain Kurikulum Merdeka. Namun, landasan utama desain Kurikulum Merdeka adalah filosofi Merdeka Belajar sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Strategis Kemenristekbud 2020-2024 (Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020). Permendikbud mengindikasikan bahwa perubahan paradigma merupakan bagian dari desain makro Merdeka Belajar demikian halnya kurikulum dan pembelajaran.

Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dirancangan oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Nadiem membuat kebijakan merdeka belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian *Programme for International Student Assesment (PISA)* tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang matematika dan literasi. Satu aspek lainnya adalah survei karakter yang menekankan pencaria nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila yang telah dipraktekkan peserta didik. Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu (Siti Mustaghfiroh, 2020).

Filosofi Merdeka Belajar dicetuskan oleh Bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara yang juga menjadi landasan penting dalam memformulasi prinsip desain kurikulum. Ia mengatakan, kemerdekaan merupakan tujuan pendidikan sekaligus sebagai prinsip yang melandasi strategi untuk mencapai tujuan, kemerdekaan menurutnya sebagai tujuan belajar (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, 2021). Perubahan paradigma ditujukan untuk memberikan keleluasaan guru dalam mengendalikan proses pembelajaran, memerdekakan guru dalam mengontrol proses pembelajaran agar lebih variative. Memberikan hak dan kemampuan peserta didik mengambil langkah-langkah secara proaktif dan bertanggungjawab untuk pencapaian dirinya.

Visi Ki Hajar Dewantara yang memadukan kemampuan kognitif, kecerdasan sosial-emosional, kemauan untuk belajar, bersikap, dan mengambil Tindakan atau afektif dalam rangka melakukan perubahan, mendapatkan momentum terutama pada konteks sekarang. Untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan para pendiri bangsa (*founding fathers*). Maka prinsip sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan, fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik, fleksibel, selaras, bergotong royong, dan memperkuat hasil kajian dan umpan balik harus jadi pegangan dalam proses perancangan kurikulum.

Kerangka Kurikulum Merdeka

Kerangka kurikulum merupakan landasan fundamental dalam pengembangan struktur kurikulum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan dalam Pasal 38 disebutkan bahwa kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum menjadi landasan pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (Permen RI No. 57, 2021). Capaian Pembelajaran (CP) yang dikuatkan untuk mencapai tujuan adalah dengan mengurangi cakupan materi dan perubahan tata cara penyusunan capaian yang menekankan pada fleksibilitas dalam pembelajaran.

Pengurangan materi pelajaran dan pokok bahasan merupakan konsekuensi daripada pembelajaran yang berorientasi kompetensi.

Penelitian yang dilakukan Pritchett dan Beatty menunjukkan beberapa negara termasuk Indonesia, materi pelajaran yang padat akan mengurangi aspek pendalaman materi, karena guru hanya berpikir bagaimana merampungkan materi dan pertemuan tanpa memperhatikan pemahaman pelajaran tersebut. Pelajaran disampaikan dengan terburu-buru, peserta didik tidak memiliki cukup waktu untuk memahami konsep secara mendalam, yang sebenarnya sangat penting untuk menguatkan fondasi kompetensi mereka (Pritchett, L dan Beatty A,). Padatnya materi pelajaran selama ini berimplikasi langsung pada hilangnya kesempatan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir.

Struktur Kurikulum Merdeka

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar (Permen RI No. 57, 2021). Karakteristik utama yang ditekankan dalam rancangan struktur kurikulum adalah sebagai berikut: adanya perubahan status mata pelajaran, satuan pendidikan memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum operasional, pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu intrakurikuler dan kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan adanya pilihan yang dapat ditentukan oleh peserta didik (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan,). Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam satu tahun dan dilengkapi dengan sasaran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara regular/mingguan. Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci dijelaskan dalam daftar tanya jawab per jenjang (Kemdikbud RI,). Karakteristik utama dalam desain struktur kurikulum Merdeka Belajar meliputi:

Perubahan Status Mata Pelajaran. Upaya penguatan pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik di masa sekarang dan masa yang akan datang. Perubahan tersebut juga dilakukan sebagai upaya mengembangkan dan meningkatkan keselarasan pembelajaran antara satu jenjang dan jenjang berikutnya. Penyesuaian status mata pelajaran (misalnya, dari mata pelajaran tidak wajib menjadi mata pelajaran wajib atau dianjurkan), sehingga peningkatan kompetensi setiap peserta didik dapat lebih optimal. Beberapa perubahan tersebut meliputi:

Bahasa Inggris dianjurkan untuk mulai diajarkan sejak jenjang Sekolah Dasar (SD)

Sejalan dengan perkembangan paradigma dunia tentang makna pendidikan, pendidikan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang semakin berat. Salah satu tantangan nyata tersebut adalah bahwa pendidikan hendaknya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi utuh, yaitu kompetensi berpikir dan komunikasi. Kompetensi komunikasi dengan menggunakan Bahasa Inggris semakin dianjurkan pada pengembangan kurikulum ini, karena didorong oleh tiga hal: bahasa Inggris sebagai kebutuhan seluruh anak Indonesia, keselarasan kurikulum Bahasa Inggris, dan pemerataan kualitas pembelajaran. Untuk dapat berkomunikasi lintas budaya dan antar bangsa serta berperan aktif sebagai masyarakat dunia, keterampilan Bahasa Inggris merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) yang seharusnya dimiliki seluruh anak Indonesia. Menurut Kickpatrick Bahasa Inggris telah menjadi *lingua franca* atau basantara, termasuk untuk masyarakat di Asia Tenggara yang menggunakan bahasa ibu dan bahasa resmi yang berbeda-beda (Kickpatrick,). Penguatan keterampilan Bahasa Inggris peserta didik sebagai alat komunikasi global selaras dengan komitmen pemerintah untuk mengembangkan setiap dimensi dalam Profil Pelajar Pancasila termasuk berkebinekaan global maka penguatan Pendidikan Bahasa Inggris merupakan salah satu hal yang diutamakan dalam Kurikulum Merdeka.

Keselarasan kurikulum Bahasa Inggris dalam kurikulum nasional juga menjadi salah satu pertimbangan yang mendorong kepada satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk menganjurkan pengajaran mata pelajaran ini. Pusat Kurikulum dan Perbukuan menemukan

kerancuan dalam kompetensi yang harus dicapai peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tanpa pelajaran Bahasa Inggris di jenjang SD, mereka diharapkan untuk mencapai kompetensi yang sebenarnya merupakan kemampuan tahap menengah (*intermediate level*), (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan,). Tanpa ada/melewati pembelajaran di level dasar (*basic level*), mereka langsung diharapkan mencapai level yang cukup kompleks. Oleh karena itu, salah satu solusi yang paling tepat untuk merespon kesenjangan tersebut yaitu menyediakan pendidikan Bahasa Inggris level dasar di jenjang SD. Pengajaran Bahasa Inggris sejak jenjang SD melalui kebijakan, perencanaan dan penyelenggaraan yang didesain dengan analisis yang mendalam akan menstimulasi penguatan dasar Bahasa Inggris. Menurut Singleton dkk, kajian menunjukkan manfaat mengajarkan Bahasa Inggris di jenjang SD antara lain adalah terbangunnya rasa percaya diri untuk menggunakan Bahasa Inggris sekaligus membangun kesadaran global dan kompetensi antarbudaya (Singleton dkk,). Pada titik ini, mata pelajaran Bahasa Inggris selain mengajarkan Teknik dan keterampilan berbahasa tetapi juga mengembangkan wawasan global dimana peserta didik lebih mudah memahami disparitas budaya dan terbangun sikap toleransi.

Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) di Jenjang SD

Mata pelajaran ini ditujukan untuk membangun kompetensi literasi sains dasar. Mengajarkan IPAS di jenjang SD sebagai fondasi peserta didik untuk mempelajari lebih kompleks di jenjang SMP. Di jenjang Sekolah Dasar (SD) peserta didik mempelajari lingkungannya melalui pengamatan fenomena alam dan sosial sebagai suatu fenomena yang terintegrasi. Mereka membiasakan diri untuk mengamati, mengeksplorasi dan melakukan kegiatan yang mendorong kemampuan inkuiri lainnya yang fundamental sebelum mempelajari konsep dan topik yang lebih spesifik di mata pelajaran IPA dan IPS di jenjang SMP.

Pendekatan inkuiri menekankan pada pembangunan pemahaman peserta didik akan suatu konsep. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator, mendorong kemandirian peserta didik. Hal ini senada dengan teori perkembangan anak yang dipakai dalam pengembangan Kurikulum Merdeka maka usia SD merupakan masa strategis untuk mengembangkan kemampuan inkuiri anak. Pada Kurikulum Merdeka, mata pelajaran IPA dan IPS dijadikan satu menjadi Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) karena dasar dari kedua mata pelajaran ini adalah pengembangan keterampilan inkuiri atau kemampuan berpikir.

Mata Pelajaran Informatika di Jenjang SMP menjadi Wajib

Pada Kurikulum 2013, mata pelajaran Informatika adalah mata pelajaran pilihan. Tetapi, pada Kurikulum Merdeka, mata pelajaran ini ditengarai sangat penting untuk dipelajari sehingga dijadikan mata pelajaran wajib. Pertimbangan utamanya adalah karena literasi digital yang banyak dipelajari melalui mata pelajaran Informatika menjadi kebutuhan penting saat ini. Mata pelajaran Informatika mengajarkan keterampilan penggunaan computer sekaligus kemampuan berpikir komputasi (*computational thinking*) yang membangun keterampilan menyelesaikan masalah, berpikir logis, sistematis, mengolah dan menggunakan data, serta kemampuan berpikir system (*system thinking*). Pentingnya kemampuan-kemampuan tersebut untuk mengembangkan literasi dan enumerasi maka status wajib mulai diterapkan dalam Kurikulum Merdeka di jenjang SMP dan SMA kelas X, dan kemudian menjadi salah satu mata pelajaran pilihan di kelas XI dan XII.

Mata pelajaran Informatika menjadi wajib didasari oleh data empiris yang telah diperoleh melalui uji coba implementasi kurikulum dalam Program Sekolah Penggerak (PSP). dari 573 satuan SMP yang mengikuti PSP untuk kelas VII pada Tahun Ajaran 2021/2022, sebanyak 542 (sekitar 95%) SMP mengajarkan mata pelajaran Informatika di sekolah mereka. Tingginya angka tersebut mengindikasikan bahwa kewajiban mata pelajaran informatika di jenjang SMP adalah kebijakan yang siap diimplementasikan. Namun demikian, 5% sisanya yang belum siap untuk mengajarkan informatika perlu diperhatikan. Masalah yang dihadapi 31 satuan SMP tersebut adalah tidak ada guru yang siap untuk mengampu mata pelajaran informatika. Masalah

ini tentunya perlu direspon dengan dua acara: menugaskan guru untuk mengikuti pelatihan atau diklat peningkatan kompetensi mata pelajaran informatika dan pengadaan guru yang berlatarbelakang sarjana informatika.

Menghadapi situasi kurangnya guru Informatika di jenjang SPM, Pemerintah menetapkan keputusan bahwa mata pelajaran informatika SMP dan SMA kelas X dapat diampuh oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikasi pendidik bidang Ilmu Komputer, Informatika, MIPA atau guru yang selama ini mengampu Bimbingan TIK (Kepmendikbudristek Nomor 162, 2021). Keputusan tersebut mengacu pada prinsip fleksibilitas, sembari tetap memperhatikan kualitas pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi. Desain kurikulum Informatik SMP dan SMA kelas X dilandasi dengan kesadaran akan adanya tantangan ketersediaan guru. Untuk membantu guru yang relatif baru dalam pengalaman mengajar mata pelajaran informatika ini maka pemerintah menyediakan buku panduan guru dan beragam contoh silabus/alur pembelajaran serta modul ajar.

Muatan Lokal dapat Dikembangkan dalam Bentuk yang lebih Variatif

Dalam Kurikulum 2013, muatan lokal merupakan satu mata pelajaran. Kebijakan tersebut diubah dalam Kurikulum Merdeka, muatan lokal dapat diajarkan melalui tiga acara yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan, yaitu mengintegrasikan muatan lokal ke dalam proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila, atau mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal seperti halnya dalam Kurikulum 2013 (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan). Pilihan ini diberikan kepada satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah agar mereka dapat mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.

Dalam pengaturan muatan lokal mengacu pada prinsip fleksibel. Melihat kondisi lokalitas setiap daerah dan satuan Pendidikan yang secara *setting* sosial dan geografis cukup berbeda-beda satu dengan lainnya. Oleh karena itu, setiap daerah diberikan kewenangan untuk menentukan bagaimana muatan pelajaran yang berbasis pada konteks lokal tersebut diorganisasi dan diajarkan kepada peserta didik. Berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari uji coba kurikulum ini di Sekolah Penggerak, Sebagian besar sekolah mengajarkan muatan lokal sebagai mata pelajaran tersendiri karena diatur oleh pemerintah daerah masing-masing. Sementara sisanya diintegrasikan muatan lokal dalam mata pelajaran lain atau dalam proyek penguatan moril pelajar Pancasila.

Prinsip Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka

Pembelajaran merupakan ragam aktivitas dan kegiatan terencana yang dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu di bawah bimbingan, arahan, dan dorongan guru. Prinsip pembelajaran dan asesmen adalah bagian dari kerangka kurikulum yang utamanya merujuk pada Standar Proses dan Standar Penilaian dari Standar Nasional Pendidikan. Prinsip pembelajaran dan Asesmen diformulasikan untuk menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan yang bertemali dengan pembelajaran dan asesmen, terutama guru, pimpinan sekolah, dan termasuk juga pengembang kurikulum dan perangkat ajar (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan,).

Prinsip pembelajaran dan asesmen didesain untuk menetapkan Capaian Pembelajaran. Dalam desain ini juga dikembangkan capaian karakter dan kompetensi di setiap diri pelajar Pancasila. Membangun karakter disetting melalui pengalaman belajar (*learning experience*), interaksi antara guru dan peserta didik, regulasi dan pembiasaan dalam kelas, dan strategi pengelolaan kelas. Aktivitas pembelajaran dan asesmen didesain dan dikelola agar pemerintah memberikan panduan teknis serta prinsip-prinsip sehingga peserta didik memahami tujuan pembelajaran dan asesmen yang mereka desain dan implementasikan.

Secara spesifik pemerintah hanya mengatur prinsip dan asesmen, sementara guru memiliki kewenangan secara luas untuk mendesain, mengajar, dan melakukan asesmen. Dalam konteks ini, realitas pembelajaran dan asesmen disesuaikan dengan kondisi faktual dari masing-masing kelas dan satuan pendidikan. Pada titik ini, spirit Merdeka Belajar dan prinsip desain kurikulum yang

fleksibel dan memberikan otonomi pada satuan pendidikan dan guru. Kebijakan pengaturan prinsip pembelajaran dan asesmen dalam Kurikulum Merdeka juga sudah dipraktekkan di beberapa negara, seperti Finlandia yang memuat prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen dalam dokumen mereka (Finnish National Board of Education, 2014). Pemerintah Finlandia memaparkan secara lengkap asesmen yang diinginkan untuk diimplementasikan di setiap satuan Pendidikan. Dalam penjelasan tersebut hanya disampaikan untuk bahan pemahaman guru tentang urgensi asesmen dalam membangun budaya dalam mensukseskan proses pembelajaran.

Perangkat Ajar

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mengatur dalam Pasal 65 bahwa buku teks utama yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat wajib digunakan satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dalam pembelajaran. Satuan pendidikan yang tidak menggunakan buku teks utama akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan bantuan pendidikan, penghentian bantuan pendidikan, perekomendasi penurunan peringkat dan/atau pencabutan akreditasi, penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan satuan Pendidikan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun, 2017). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 Pasal 53 dinyatakan bahwa selain menggunakan buku teks utama yang disediakan pemerintah, satuan pendidikan dapat menggunakan buku teks pendamping dan/atau buku nonteks yang telah disahkan oleh pemerintah pusat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57, 2019). Perangkat ajar atau buku teks digunakan menyesuaikan dengan kurikulum yang digunakan,

Dalam Kurikulum Merdeka, perangkat ajar yang populer disebut bahan ajar digunakan oleh guru dalam upaya mencapai profil Pancasila dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun yang dimaksud perangkat ajar yang dikembangkan tersebut adalah modul ajar, buku teks pelajaran, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Modul Ajar, modul ajar sebagai pengembangan dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dilengkapi dengan panduan yang lebih terperinci, termasuk lembar kegiatan peserta didik dan asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Disebut sebagai modul karena perangkat ini dapat digunakan secara modular (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan,). Modul ajar yang digunakan dalam Kurikulum Merdeka ini juga berisikan tujuan, Langkah, media pembelajaran dan asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit/topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Guru bebas Menyusun sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik serta kebutuhan peserta didik. Sementara pemerintah menyediakan contoh modul ajar yang dijadikan inspirasi untuk sekolah, pilihan yang memudahkan dan meringankan beban guru dalam penyusunan rancangan pembelajaran (Dewi Rahmadayanti dan Agung Hartoyo, 2022).

Modul ajar memiliki empat kriteria sebagai berikut: *esensial*, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin, *menarik*, *bermakna*, dan menantang; menumbuhkan minat peserta didik untuk belajar dan melibatkan peserta didik untuk aktif dalam proses belajar. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peserta didik sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks tetapi tidak juga mudah untuk tahap usianya, *relevan* dan *kontekstual*; berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peserta didik sebelumnya, sesuai dengan konteks waktu dan temat keberadaan peserta didik, *berkesinambungan*; keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik (Dewi Rahmadayanti dan Agung Hartoyo, 2022). Penyusunan modul ajar dalam Kurikulum Merdeka disesuaikan dengan kebutuhan pelajarannya.

Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan dokumen yang berisikan tujuan, Langkah-langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun tema yang dapat dipilih untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan

disusun dalam modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk sekolah dasar, antara lain:

Gaya hidup berkelanjutan; peserta didik memahami dampak dari aktivitas manusia, baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun sekitarnya. Peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya serta mengembangkan kesiapannya untuk menghadapi dan memitigasinya.

Kearifan lokal; peserta didik membangun rasa ingin tahunya dan kemampuan inkuiri melalui eksplorasi budaya dan kearifan local masyarakat sekitar atau daerah tertentu, serta perkembangannya. Peserta didik mempelajari proses dan alasan masyarakat local/daerah dapat berkembang seperti yang ada, konsep dan nilai-nilai dibalik kesenian dan tradisi local, serta merefleksikan nilai-nilai yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan mereka.

Bhinneka Tunggal Ika; peserta didik mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat akan keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Peserta didik juga akan mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaan, secara kritis maupun reflektif menelaah berbagai stereotip negative serta dampaknya terhadap timbulnya konflik dan kekerasan.

Bangunlah Jiwa dan Raganya; peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan dalam memelihara Kesehatan fisik maupun mental baik untuk dirinya maupun orang disekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan diri, perundungan, serta berupaya mencari jalan keluarnya. Peserta didik juga akan menelaah masalah yang berkaitan dengan Kesehatan fisik dan mental, termasuk juga isu mengenai narkoba dan penyalahgunaannya, pornografi dan Kesehatan reproduksi.

Rekayasa dan teknologi; peserta didik menggunakan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif serta berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan diri dan sekitarnya. Peserta didik dapat membangun budaya *smart society* dengan menyelesaikan beragam persoalan di masyarakat sekitarnya melalui inovasi dan penerapan teknologi, mensinergikan aspek sosial dan aspek teknologi.

Kewirausahaan; peserta didik mengidentifikasi potensi ekonomi ditingkat local/sekitarnya dan masalah dalam mengembangkan potensi tersebut, mengaitkan dengan berbagai aspek seperti lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, terbuka luas cakrawala wawasan tentang peluang di masa depan, lebih peka akan kebutuhan di masyarakat, terampil memecahkan masalah, menumbuhkembangkan kreativitas dan budaya berwirausaha peserta didik serta siap menjadi tenaga kerja yang berintegritas dan professional.

Proyek penguatan profil Pancasila di Sekolah Dasar alokasi waktu sekitar 20%-30% dari total jam pelajaran per tahun, sehingga alokasi waktu untuk tiap proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidaklah sama yang memungkinkan pelaksanaan proyek yang satu dengan proyek lainnya tidaklah sama. Di jenjang Sekolah Dasar, dalam 1 tahun ajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat dilaksanakan dengan memilih sekurang-kurangnya 2 proyek dengan 2 tema berbeda.

Buku Teks, dalam Kurikulum Merdeka, buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Buku teks utama adalah buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran, terdiri atas buku peserta didik dan buku panduan guru. Buku peserta didik merupakan buku pegangan, dan buku guru merupakan acuan untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku peserta didik tersebut. Berdasarkan kebutuhan dan karakteristik mata pelajaran, beberapa mata pelajaran hanya terdapat buku panduan guru saja, seperti Pendidikan Pancasila, Seni, dan Prakarya, dan PJOK. Buku teks utama diimplementasikan secara terbatas di sekolah pelaksana Kurikulum Merdeka.

Kesimpulan

Pendidikan merupakan proses yang mampu membentuk dan memberdayakan manusia menuju manusia cerdas, berilmu, berpengetahuan dan terdidik. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan institusi pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kendali pendidikan mendesain kebijakan-kebijakan yang bertujuan peningkatan mutu. Kebijakan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar saat ini menjadi solusi kontributif peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk membangun bangsa kedepan. Terakhir penelitian ini berkontribusi dalam memberikan informasi terkait mindset kurikulum Merdeka (komponen umum dan komponen khusus) yang dirumuskan dan diadaptasi naskah akademik Kurikulum Merdeka dan pedoman Kurikulum Merdeka. Hasil kajian ini juga menjadi rekomendasi dan ide untuk riset-riset berikutnya.

Referensi

- Apple, Michael W. *Ideologi dan Kurikulum*, ter. Kumala Sari, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2021.
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kajian Akademik: Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*.
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kajian Akademik: Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*, Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemenristebud, Edisi 1 2021.
- Baro'ah, Siti. Kebijakan Merdeka Belajar sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan, *Jurnal Tawadhu* 4, No. 1 (2020): 1064.
- Damayanti, A. T., Pradana, B. E., & Putri, B. P. (2023). Literature Review: Problematika Kesiapan Guru Terhadap Penerapan Kurikulum Merdeka. *SNHRP*, 5, 465-471.
- Finnish National Board of Education, 2014,
- Insani, A. H., & Munandar, K. (2023). Studi Literatur: Pentingnya Pembelajaran Berdiferensiasi di Era Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik. *ScienceEdu*, 6(1), 6-11.
- Jojo, A., & Sihotang, H. (2022). Analisis kurikulum merdeka dalam mengatasi learning loss di masa pandemi Covid-19 (analisis studi kasus kebijakan pendidikan). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5150-5161.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka*.
- Kepmendikbudristek Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Program Sekolah Penggerak,
- L, Pritchett dan Beatty A, Slow down, You are going too fast: Matching Curricula to Student Skill Levels. *International Journal of Educational Development*, 276-288.
- Mustaghfiroh, Siti. Konsep “ Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey, *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 3, No.1 (2020): 141-147.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 38.
- Puskur, Gagasan Kurikulum Masa Depan, Jakarta: Balitbang Puskur Depdiknas.
- Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Praktik Menjanjikan Penerapan Kurikulum Prototipe pada Program Sekolah Penggerak, 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
- Pertiwi, I., Marlina, L., & Wiyono, K. (2023). Kajian Literatur: Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah-Sekolah Penggerak. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 7(3), 1364-1372.
- Rahmah, H. D., Ummah, L., Rahmadani, S., & Hasanah, L. (2022). Studi Literatur Perbandingan Pembelajaran Pancasila dalam Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di PAUD. *Jurnal Pelita PAUD*, 7(1), 179-189.
- Ramadani, F. R. F. (2023). Studi Literatur; Analisis Tujuan Pendidikan Terhadap Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Menghadapi Tantangan Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 321-332.
- Rahmadayanti, Dewi dan Agung Hartoyo. *Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar*, *Jurnal Basicedu*, 6. No. 4 T (2022): 7174-7187.
- Rahayu, Restu dkk, Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak, 6, No. 4 (2022): 6313-6319.
- Sapitri, L. (2022). Studi literatur terhadap kurikulum yang berlaku di Indonesia saat pandemi COVID-19. *Inovasi Kurikulum*, 19(2), 227-238.
- Sukmana, Nana Syaodih. Pengembangan Kurikulum, Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2013.
- Susanti, M., Rahmadona, T., & Fitria, Y. (2023). Studi Literatur: Perbedaan Penilaian Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Basicedu*, 7(1), 339-350.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan, Pasal.
- Uno, Hamzah B. dkk, Pengembangan Kurikulum; Rekayasa Pedagogik dalam Pembelajaran, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Zahwa, N., Hilda, N. R., Astuti, T. K., Weryani, W., Prasetyawati, Y., & Zulkardi, Z. (2022). Studi literatur: implementasi merdeka belajar dalam meningkatkan mutu pembelajaran matematika selama pandemi. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 8(1), 110-119.
- Yani, Ahmad. "Mindset Kurikulum 2013." Bandung: Alfabeta, 2013.